

## **BAB II**

### **POTRET KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF SPASIAL DAN TATA RUANG: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BAGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam bab ini, akan berisi pembahasan mengenai gambaran Kabupaten Pemalang dari beberapa perspektif yang meliputi aspek geografis, demografis, sosial budaya, dan ekonomi untuk memahami dinamika pembangunan daerah. Analisis diawali dengan gambaran geografis Kabupaten Pemalang, yang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa. Eksistensi bentang alam yang beragam mulai dari pantai, dataran rendah, hingga pegunungan membuat penting untuk menganalisis konteks wilayah ini dalam menemukan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur dan tata ruang. Memahami karakteristik geografis ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.

Selain itu, analisis demografis akan memberikan wawasan mengenai struktur populasi dan dinamika sosial yang memengaruhi pembangunan daerah. Data demografis akan memberikan wawasan tentang dinamika sosial yang memengaruhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Dengan populasi yang terus berkembang, penting untuk melakukan analisis terhadap pertumbuhan penduduk yang berdampak pada penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang di Kabupaten Pemalang. Aspek lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya juga penting dalam menentukan potensi ekonomi masyarakat, keberagaman budaya dan tradisi lokal yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat serta

memengaruhi pola interaksi sosial. Memahami konteks ekonomi, sosial, dan budaya ini penting dalam membantu dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan menciptakan program pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

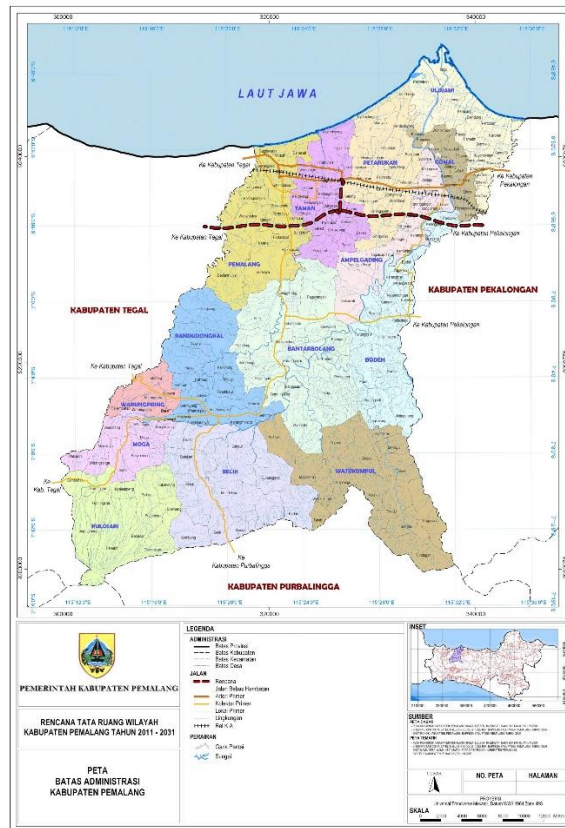
Profil kelembagaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya juga penting dibahas dikarenakan instansi ini memiliki peran strategis dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur serta tata ruang di daerah. Pembahasan struktur organisasi, fungsi, dan proyek apa saja yang telah ditangani. Dengan memahami peran kelembagaan ini, kita dapat menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan serta mencari cara untuk meningkatkan kinerja dinas dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai landasan hukum dalam pengaturan tata ruang di daerah. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah dalam mengelola barang milik daerah yang dimiliki. Barang milik daerah tersebut salah satunya aset bergerak seperti kendaraan dinas, peralatan berat, dan mesin milik dinas yang menjadi instrumen pembangunan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Pematang Jaya. Memahami bagaimana aset-aset ini dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pembangunan serta memastikan bahwa investasi infrastruktur memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan membahas seluruh aspek tersebut secara komprehensif, bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai potret Kabupaten Pematang Jaya dari kacamata perspektif spasial serta tata ruang. Analisis pada karakteristik

geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan budaya akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh daerah ini. Selain itu, penekanan pada peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai lembaga kunci dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang berkelanjutan. Pembahasan mengenai peraturan yang berimplikasi pada pengelolaan aset bergerak sebagai instrumen pembangunan infrastruktur akan menyoroti bagaimana sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan daerah. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik serta strategi pembangunan yang berkelanjutan, sehingga Kabupaten Pematang Jaya dapat mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.

## 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pemalang

**Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Pemalang**



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang termasuk dalam salah satu daerah bagian dari 29 kabupaten dengan enam kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah yang berada di bagian barat dengan luas wilayah mencapai 111.530 km<sup>2</sup>. Letak astronomis wilayah ini berada di antara 109°17'30" – 109°40'30" BT dan 6°52'30" – 7°20'11" LS. Ibu kota dari kabupaten ini adalah Kota Pemalang, yang berada di bagian ujung barat laut wilayah kabupaten dan tepat berada di perbatasan Kabupaten Tegal. Jarak Kabupaten Pemalang berada pada sekitar 135 km ke arah barat jika dihitung dari

wilayah Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Akses menuju Kabupaten Pemalang dari wilayah Semarang dapat ditempuh melalui jalur darat dengan dua alternatif, melalui jalur tol trans jawa yang memakan waktu 1-2 jam. Sedangkan, untuk jalur konvensional melalui jalan lintas Pantura dapat memakan waktu sekitar 4-5 jam. Kabupaten Pemalang memiliki lokasi yang terbilang strategis, sebab berada di lintas pantai utara jawa yang terhubung dari Surabaya hingga Jakarta. Jika dari Jakarta, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Pemalang sekitar 5-6 Jam via Jalan Tol Trans-Jawa. Terdapat juga jalur selatan yang merupakan jalan provinsi yang menjadi penghubung Pemalang dengan Purbalingga.

Batas wilayah Kabupaten Pemalang antara lain:

Barat	Kabupaten Tegal
Utara	Laut Jawa
Timur	Kabupaten Pekalongan
Selatan	Kabupaten Purbalingga

Keberadaan Kabupaten Pemalang dapat ditelusuri mulai dari zaman prasejarah, yang dibuktikan dengan penemuan berbagai artefak arkeologis. Di daerah ini, ditemukan struktur punden berundak dan area pemandian, serta artefak seperti patung Ganesa, Lingga, dan batu nisan di desa Kropak. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa Pemalang telah dihuni oleh peradaban manusia sejak lama. Penamaan Kabupaten Pemalang diyakini telah berlangsung sejak zaman Majapahit. Saat itu, Patih Gajah Mada menjadikan wilayah ini sebagai pangkalan perang untuk menyerang Sriwijaya. Pada masa ini, Pemalang dikenal sebagai wilayah perdikan di bawah penguasaan Ki Buyut Jiwandono atau Ki Buyut Banjarsari, yang

kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Raden Joko Malang. Nama “Pemalang” sendiri diyakini berasal dari nama Joko Malang, dengan arti “tempat yang dikuasai Joko Malang” dalam bahasa Jawa. Pada abad ke-16, Pemalang menjadi bagian dari Kesultanan Mataram setelah ditaklukan oleh Panembahan Senopati. Pada tahun 1575, Pemalang tercatat sebagai salah satu dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa yang dipimpin oleh seorang raja. Selama periode ini, Pemalang berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan maritim penting di pesisir utara Jawa. Selama masa kolonial Belanda, Pemalang mengalami perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan ekonomi. Pada tahun 1820-an, Bupati Pemalang terlibat dalam Perang Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Setelah perang tersebut, Pemalang menjadi bagian dari karisidenan Pekalongan dan mengalami perkembangan dalam sektor pertanian, terutama sebagai penghasil padi, kopi, dan tembakau.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kabupaten Pemalang memasuki masa revolusi kemerdekaan. Selama periode ini, terjadi dua revolusi besar yakni revolusi sosial dan revolusi kemerdekaan. Tokoh penting seperti Supangat muncul sebagai pemimpin daerah secara *de facto* selama masa transisi ini. Tanggal 24 Januari 1975 atau bertepatan dengan Hari Kamis Kliwon tanggal 1 Syawal 1496 Je 982 Hijriah ditetapkan menjadi hari lahirnya Kabupaten Pemalang sesuai dengan keputusan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Kabupaten Pemalang. Keputusan tersebut berdasarkan diskusi antara para pakar yang dibentuk oleh Tim Kabupaten Pemalang. Pemalang sering disebut sebagai

“Pusere Jawa” atau pusat Pulau Jawa karena letaknya yang strategis di tengah-tengah pulau. Slogan ini dicanangkan untuk menegaskan posisi geografis dan peran historis Kabupaten Pemalang dalam sejarah peradaban Jawa. Saat ini, Kabupaten Pemalang dipimpin oleh seorang Bupati yang dipilih setiap lima tahun sekali dalam proses pemilihan kepala daerah. Sejak tahun 1820 hingga kini, terhitung lebih dari 26 bupati atau pelaksana harian (Plh) / pelaksana tugas (Plt) telah memimpin Pemalang.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dengan luas mencapai 111.530 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan, 11 kelurahan, dan 211 desa. Pusat pemerintahannya terletak di Kecamatan Pemalang, yang meliputi Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami. Pada tahun 2017, populasinya mencapai 1.471.174 jiwa dengan luas wilayah 1.118,03 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 1.316 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten Pemalang adalah Kecamatan Bantarbolang yang memiliki luas 139,19 km<sup>2</sup>, lanjut diikuti oleh Kecamatan Watukumpul sebesar 129,02 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Belik sebesar 124,54 km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kecamatan Warungpring memiliki luas wilayah terkecil, yaitu sebesar 26,31 km<sup>2</sup>. Dengan posisinya yang strategis, Kabupaten Pemalang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan yang penting. Selain itu, daerah ini memiliki keunggulan SDA yang melimpah dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan SDM yang besar. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Pemalang sebagai sebuah potensi yang siap untuk

diolah. Topografi alam yang dimiliki Kabupaten Pemalang sangat beragam, seperti pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan, membuat tanah di Kabupaten Pemalang sangat subur dan pemandangan yang indah dan asri. Daerah ini cocok dijadikan sebagai tempat berwisata.

### **2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Pemalang**

Secara astronomis, Kabupaten Pemalang terletak di antara 109° 17' 30" – 109° 40' 30" BT dan 7° 52' 30" – 7° 20' 11" LS. Kabupaten Pemalang terletak sekitar 135 km di barat Kota Semarang, Kabupaten Pemalang dapat dicapai dalam waktu 2 – 3 jam dengan kendaraan darat. Luas wilayah Kabupaten Pemalang mencapai 1.115,30 km<sup>2</sup>. Topografi Kabupaten Pemalang sangat bervariasi. Pada bagian utara Kabupaten Pemalang merupakan daerah garis pantai dengan ketinggian antara 1 – 5 meter di atas permukaan laut. Bagian utara juga merupakan dataran rendah yang berbatasan dengan laut Jawa, memiliki ketinggian rata-rata 6 – 13 meter yaitu Kecamatan Ulujami, Comal, Ampelgading, Taman dan Pemalang. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 15 – 213 meter di atas permukaan laut yaitu Kecamatan Bantarbolang, Bodeh, Randudongkal, dan Warungpring; sedangkan bagian selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta memiliki iklim sejuk dengan ketinggian 497 – 914 meter di atas permukaan laut yang meliputi Kecamatan Moga, Belik, Watukumpul, dan Pulosari. Puncak tertinggi Kabupaten Pemalang adalah Gunung Slamet, yang juga berada di antara empat kawasan lain yaitu Kabupaten Tegal, Brebes, Banyumas, dan Purbalingga. Dengan ketinggian 3.432 meter di atas

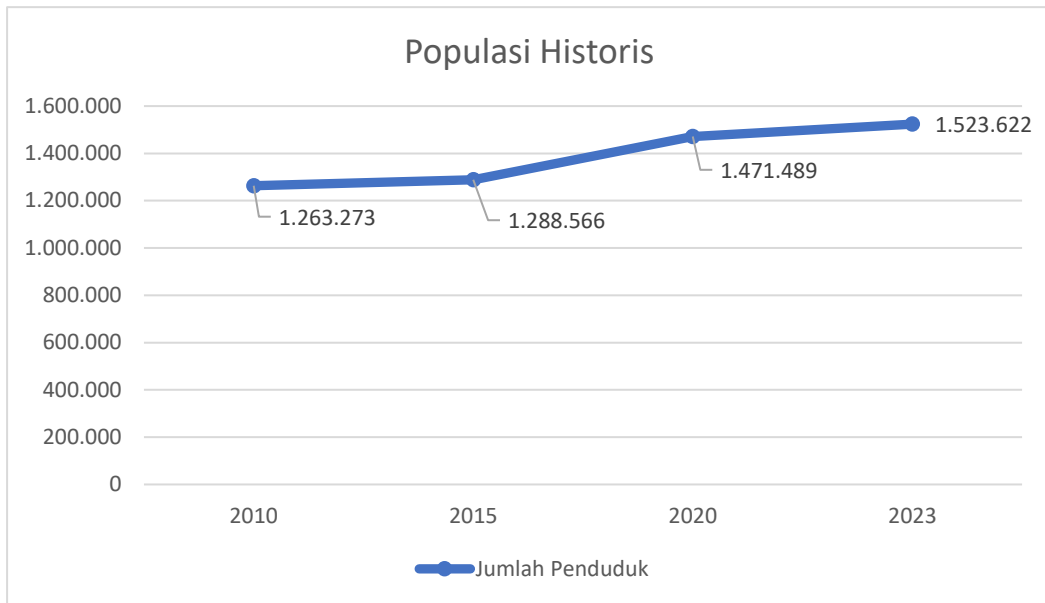


permukaan laut (mdpl) membuat Gunung Slamet dinobatkan sebagai gunung tertinggi di Jawa Tengah dan yang kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Wilayah bagian selatan yang termasuk ke dalam dataran tinggi sering disebut Waliksarimadu yang merupakan singkatan dari Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, Warungpring, dan Randudongkal. Warga juga sering menyebut wilayah ini sebagai daerah *kidul*. Kabupaten Pemalang juga lalui oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Rambut, Sungai Comal, dan Sungai Waluh sehingga berdampak dalam menyuburkan daerah yang ada di aliran sungai tersebut. Sungai Comal yang bermuara menuju Tanjung Pemalang yang berada di Laut Jawa menjadi yang terbesar dengan melalui tujuh kecamatan di kabupaten ini.

Iklm di Kabupaten Pemalang memiliki karakteristik yang relatif hangat dan basah, dengan variasi musiman yang signifikan. Wilayah yang berada di pantai utara Pulau Jawa, membuat iklim di wilayah ini dipengaruhi oleh faktor laut dan topografi yang bervariasi. Pada tahun 2023, beberapa wilayah di bagian selatan Kabupaten Pemalang yang terdiri dari Kecamatan Belik, Watukumpul, Moga, dan Pulosari memiliki curah hujan bulanan sangat tinggi (>500mm) di mana terjadi pada bulan Januari hingga Maret. Dengan kombinasi curah hujan tinggi, membawa kondisi cuaca yang memiliki hawa dingin dan sering turun kabut pada pagi, sore hingga malam hari di beberapa desa di kecamatan tersebut. Kondisi atmosfer umumnya cerah hingga berawan ringan, meskipun terkadang mendung dan hujan ringan sepanjang tahun. Persentase langit tertutup awan juga mengalami variasi musiman, dengan periode cerah tertinggi pada bulan tengah tahun dan periode berawan tertinggi pada bulan awal tahun.

## 2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Pemalang

**Grafik 2. 1 Populasi Historis Kabupaten Pemalang**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Analisis kependudukan Kabupaten Pemalang tahun 2023 berdasarkan populasi historis menunjukkan tendensi pertumbuhan penduduk yang positif. Mulai tahun 2010 dengan total populasi 1.263.273 jiwa. Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 2% pada tahun 2015 menjadi 1.288.566 jiwa. Namun, periode 2020 menunjukkan peningkatan signifikan sebanyak 14,2%, mencapai 1.471.489 jiwa. Terakhir, pada tahun 2023, populasi meningkat lagi sebesar 3,5% mencapai 1.523.622 jiwa. Struktur populasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang telah mengalami pertumbuhan demografis moderat dengan kepadatan rata-rata tahun 2023 sebanyak 1.315 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menegaskan pentingnya perencanaan infrastruktur sosial ekonomi yang lebih baik untuk mendukung perkembangan yang seimbang dan mendukung kebutuhan penduduk yang terus bertambah.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang mencapai 1.523.622 jiwa yang didominasi oleh penduduk laki-laki dengan jumlah yang lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal tersebut terlihat dari rasio jenis kelamin yaitu sebesar 102,72 yang berarti dari sekitar 1.000 penduduk perempuan, penduduk laki-laki ada sebanyak 1.027 jiwa. Kecamatan Pemalang sebagai ibu kota kabupaten memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 207,711 jiwa atau sekitar 13,36 persen dari total penduduk Kabupaten Pemalang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang mencapai 1.315 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Comal memiliki kepadatan terbesar yaitu sebesar 3.551 jiwa/km<sup>2</sup> yang berarti, setiap 1 km<sup>2</sup> didiami oleh sekitar 3.551 orang. Sedangkan Kecamatan Watukumpul memiliki kepadatan penduduk terendah yakni hanya sebesar 586,44 jiwa/km<sup>2</sup>.

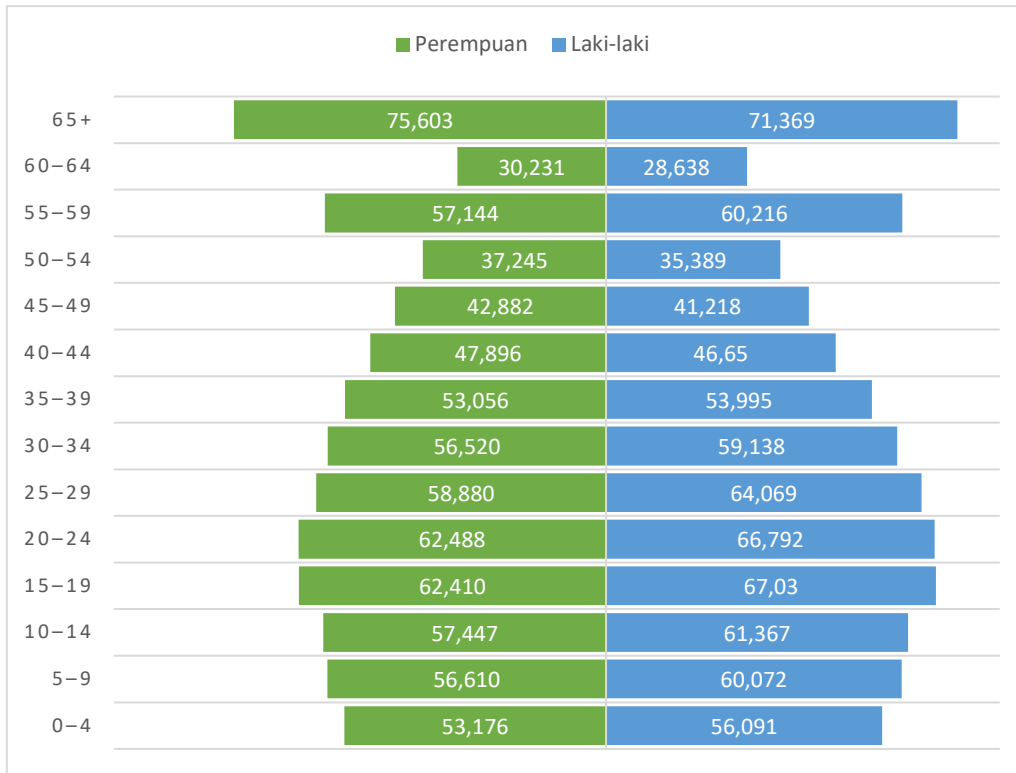
**Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Moga	38.275	37.108	75.383
2.	Warungpring	23.114	22.099	45.213
3.	Pulosari	32.095	31.395	63.490
4.	Belik	62.562	60.031	122.593
5.	Watukumpul	40.754	38.343	79.097
6.	Bodeh	32.549	31.815	64.364
7.	Bantarbolang	45.384	43.886	89.270
8.	Randudongkal	57.776	56.718	114.494
9.	Pemalang	105.070	102.641	207.711
10.	Taman	98.899	96.290	195.189
11.	Petarukan	88.963	86.885	175.848
12.	Ampelgading	38.544	38.602	77.146
13.	Comal	48.358	47.697	96.055
14.	Ulujami	59.691	58.078	117.769
	<b>Total</b>	<b>772.034</b>	<b>751.588</b>	<b>1.523.622</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan Kabupaten Pemalang menunjukkan kecenderungan jumlah laki-laki yang sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan dengan rasio sekitar 102,73. Kecamatan dengan rasio gender tertinggi adalah Watukumpul dengan rasio 106,36, menunjukkan bahwa jumlah laki-lakinya lebih dominan. Kecamatan yang hampir seimbang adalah Ampelgading, dengan rasio yang sangat mendekati kesetaraan (99,85). Beberapa kecamatan seperti Moga dan Warungpring menunjukkan rasio di atas rata-rata, menunjukkan bahwa populasi laki-lakinya lebih tinggi.

**Grafik 2. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Pemalang 2023**

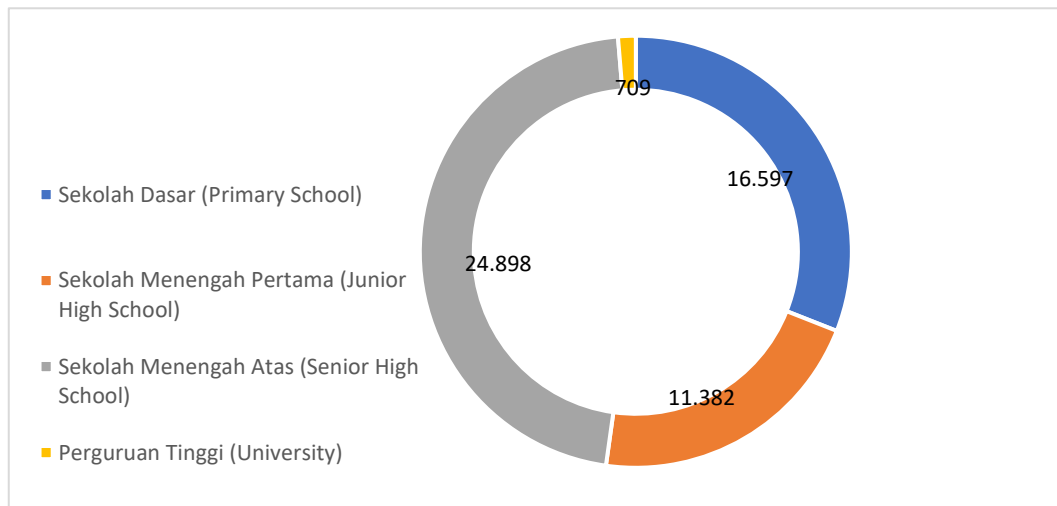


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Berdasarkan grafik di atas, kelompok usia lansia berumur 65 tahun ke atas menjadi kelompok usia dengan jumlah terbanyak dibandingkan kelompok usia lainnya. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki populasi yang signifikan di usia lanjut, yang dapat menjadi tantangan dalam hal penyediaan layanan kesehatan dan sosial. Sedangkan, kelompok usia tua berumur 50-54 tahun menjadi kelompok usia dengan jumlah penduduk paling sedikit. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa terdapat penurunan angka kelahiran atau migrasi yang mempengaruhi jumlah penduduk di kelompok usia ini. Secara keseluruhan, distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih banyak pada kelompok usia muda hingga dewasa awal. Namun,

seiring bertambahnya usia, jumlah perempuan mulai mendominasi. Seiring bertambahnya usia 50 tahun ke atas, jumlah perempuan mulai mendominasi. Hal ini mencerminkan harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan meningkatnya jumlah perempuan di atas usia lanjut, penting bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kesehatan dan dukungan sosial yang memadai bagi populasi ini.

**Grafik 2. 3 Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Pemalang, 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, angkatan kerja di Kabupaten Pemalang tahun 2023 mencapai 817,491 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Kabupaten Pemalang tercatat sebesar 69,58 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pemalang sebesar 6,55 persen. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 sebesar 763.905 orang. Proporsi terbesar pekerja pada Agustus 2023 masih didominasi oleh berusaha sendiri sebesar 33,18 persen atau 253.215 orang. Sementara proporsi terkecil

pekerja adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar hanya sebesar 2,58 persen atau 19.702. Berdasarkan data pada Grafik 2.3, diketahui bahwa jumlah pengangguran terbuka dari lulusan SD relatif tinggi sekitar 31% yang mungkin disebabkan oleh kurangnya peluang pekerjaan bagi mereka yang belum memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi. Angka pengangguran terbuka dari lulusan SMP sedikit lebih rendah daripada lulusan SD yaitu sekitar 21%. Namun, masih menunjukkan bahwa banyak siswa yang tidak berhasil masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka pengangguran terbuka dari lulusan SMA paling tinggi sekitar 47%. Hal ini mungkin disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam dunia kerja. Serta permintaan tenaga kerja yang lebih dispesialisasi. Banyak lulusan SMA yang sulit menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Angka pengangguran terbuka dari lulusan universitas relatif rendah yakni hanya 1%. Hal ini mungkin dikarenakan oleh fakta bahwa pendidikan tinggi seringkali diasosiasikan dengan pekerjaan yang stabil dan bayaran yang lebih tinggi. Namun, masih ada beberapa kasus di mana lulusan universitas sulit menemukan posisi yang tepat guna dengan kompetensi yang dimiliki.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2023 mencapai 817.491 jiwa, menunjukkan potensi kerja yang substansial dalam masyarakat. Pada level pendidikan tinggi, terdapat 38.276 orang yang telah menyelesaikan diploma hingga doktoral, yang meliputi 4,69% dari total angkatan kerja. Selanjutnya, lulusan sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 192.447 orang atau sekitar 23,55% dari total anggota aktif. Lulusan sekolah menengah pertama (SMP) mencapai 153.586 orang, yang setara dengan 18,78% dari total

anggota kerja. Lulusan sekolah dasar (SD) paling mendominasi dengan jumlah sebesar 433.182 orang, yang mencakup 52,98% dari total anggota kerja.

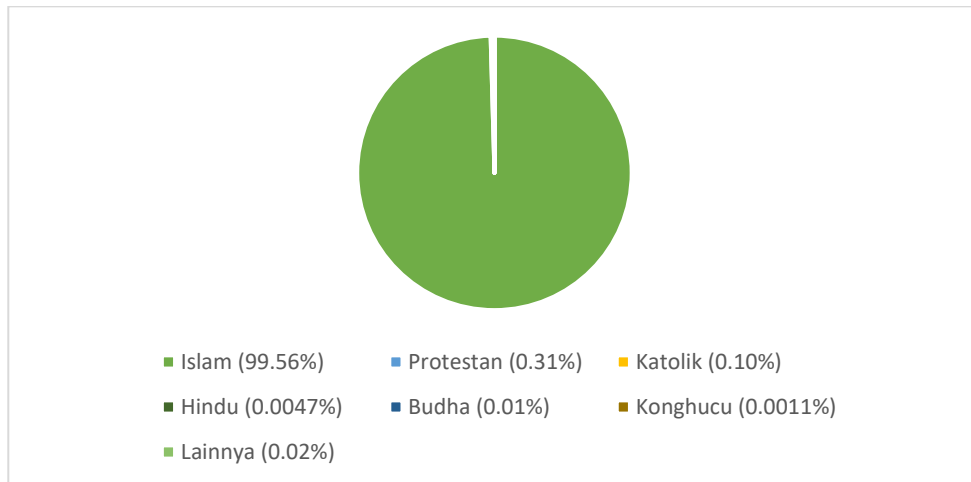
### **2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Pemalang**

Visi dan misi Kabupaten Pemalang dirumuskan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Visi Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis, dan Ngangeni (AMAN).” Dalam rangka mencapai visi tersebut, terdapat beberapa misi yang diemban, antara lain;

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Membangun mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
6. Mengembangkan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.



**Grafik 2. 4 Jumlah Penganut Agama/Kepercayaan di Kabupaten Pemalang  
2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Melalui visi dan misi ini, Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Hal tersebut ada di dalam dinamika kondisi sosial budaya di Kabupaten Pemalang yang kaya dan beragam. Mayoritas penduduk Kabupaten Pemalang beragama Islam. Selanjutnya, ada penganut agam Protestan sebanyak 4.822 jiwa dan Katolik sebanyak 1.568 jiwa. Selain masjid dan mushola, terdaftar ada 22 gereja Protestan, 6 gereja Katolik, 1 pura, 1 vihara, dan 2 klenteng yang berdiri di wilayah Kabupaten Pemalang. Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang terletak di area alun-alun Kabupaten dan telah direnovasi sebanyak empat kali sejak tahun 1980-an. Nama masjid agung ini diambil dari nama tokoh penyebar agama Islam di Pemalang. Untuk Gereja Protestan, ada dua gereja yang terkenal, yaitu Gereja Bethel Indonesia di Jalan Pemuda dan Gereja Kristen Jawa. Selain itu, Gereja Katolik tertua yang terkenal adalah Gereja Santo Lukas, yang mulai dibangun pada tahun 1871. Masyarakat Hindu di Pemalang telah memiliki Pura

bernama Satya Dharma sejak tahun 1986. Penganut Buddha di Pemalang melakukan ritual ibadah di Wihara Parama Maitreya, sedangkan penganut Konghucu beribadah di Klenteng Ti An Bio dan Klenteng Tjeng Gie Bio, yang telah ada sejak tahun 1738.

Kabupaten Pemalang dikenal memiliki bahasa yang beragam, setidaknya terdapat tiga jenis dialek yang biasa digunakan masyarakat yaitu Bahasa Jawa Tegal, Bahasa Jawa Pekalongan, dan Bahasa Jawa Banyumas. Bahasa Jawa Tegal atau Dialek Ngapak Tegalan dominan dituturkan oleh warga Pemalang, terutama di wilayah barat seperti Kecamatan Pemalang, Taman, Randudongkal, Bantarbolang, Warungpring, dan sebagian utara Moga. Bahasa Jawa Pekalongan atau Dialek Pekalongan populer di kalangan warga timur Kabupaten Pemalang seperti Kecamatan Petarukan, Comal, Ulujami, Ampelgading, dan Bodeh. Bahasa Jawa Banyumasan atau Dialek Ngapak dituturkan oleh masyarakat di dataran tinggi selatan Pemalang, terdiri dari Kecamatan Belik, Watukumpul, Pulosari, dan sebagian selatan Moga.

Kesenian di Kabupaten Pemalang merupakan salah satu warisan budaya yang sangat kaya dan beragam. Salah satu contoh kesenian tradisional yang paling terkenal adalah Tari Selendang Pemalang, yang diciptakan pada tahun 1985 oleh Ki Koestoro sebagai identitas masyarakat Pemalang. Tarian ini menggunakan selendang atau sampur dengan gerakan lincah yang merepresentasikan jiwa masyarakat Pemalang menggunakan gamelan Jawa laras slendro dan gendhing lancar, membuat suasana tarian menjadi harmonis dan menarik. Selain Tari Selendang, Kabupaten Pemalang juga memiliki Tari Silakupang, yang merupakan

kombinasi dari berbagai tari tradisional kerakyatan. Tarian ini biasanya dipertunjukkan oleh 10 – 15 penari dengan diiringi musik gamelan Jawa lengkap dengan properti kuda kepang, kurungan sintren, dupa, dan payung. Tujuan dan Tari Silakupang adalah untuk menciptakan tarian identitas yang unik bagi Kabupaten Pemalang, sambil mengajarkan nilai-nilai penting tentang pembentukan karakter masyarakat.

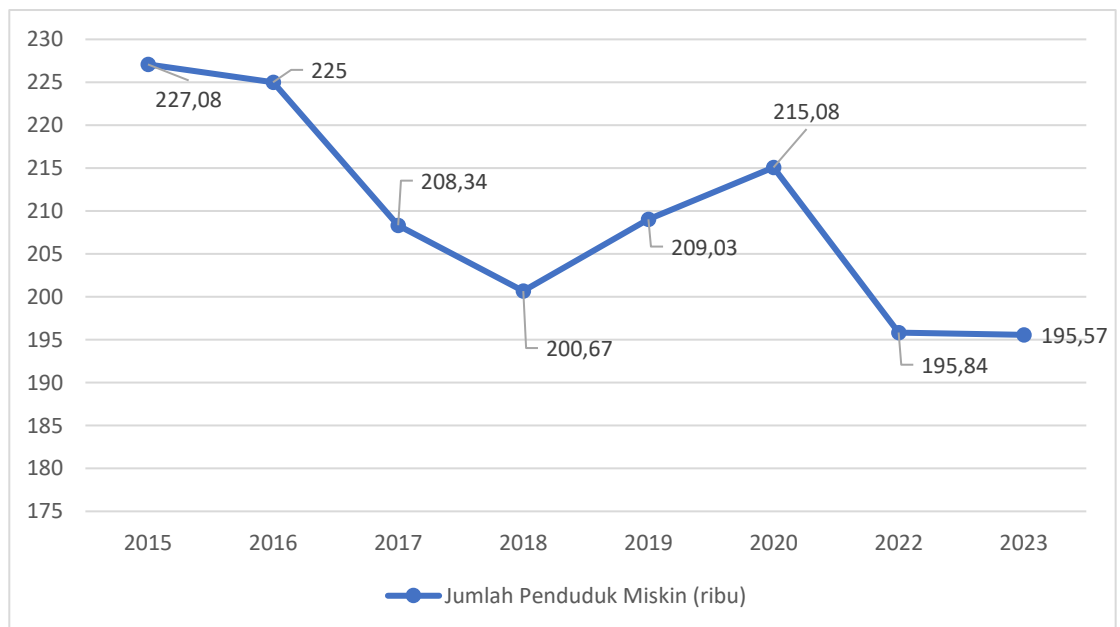
Di samping itu, Kabupaten Pemalang juga memiliki Kesenian Kuntulan, yang merupakan contoh akulturasi antara kebudayaan Islam dan Jawa. Gerakannya menggunakan gerakan silat dengan diiringi sholawat Nabi Muhammad SAW dan menggunakan alat musik berupa terbang dan bedug. Kesenian Kuntulan ini memiliki ciri khas tersendiri dan berfungsi sebagai hiburan, penyambutan tamu, dan acara-acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Semua jenis kesenian ini tidak hanya menjadi simbol identitas masyarakat Pemalang tetapi juga berperan aktif dalam melestarikan warisan budaya dan membantu membangkitkan semangat “nguri-uri budoyo” (menghidupkan kembali budayo) di kalangan masyarakat.

#### **2.1.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Pemalang**

Kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 telah menunjukkan tren yang sangat positif. Secara agregatif, pertumbuhan ekonomi Pemalang telah mencatat rata-rata di atas empat persen, yang merupakan hasil stabilitas tinggi setelah dampak COVID-19. Sektor sekunder di Kabupaten Pemalang telah berkontribusi signifikan, bahkan bersaing dengan sektor primer, sehingga meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian dan meningkatkan daya

beli penduduk. Angka pengangguran di Pemalang juga telah menunjukkan penurunan signifikan, dari 6,71 persen pada tahun 2021 menjadi 6,53 persen pada tahun 2023, yang diduga terkait dengan adanya industri-industri besar yang menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, angka kemiskinan juga terus menurun, dari 15,41 persen pada tahun 2019 menjadi 15,03 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan efektivitas program-program sosial dan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah daerah.

**Grafik 2. 5 Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang 2015 – 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang

Secara umum, garis kemiskinan di Kabupaten Pemalang mengalami penurunan mulai 2015 hingga 2023, kecuali pada tahun 2019 di mana garis kemiskinan meningkat sebelum turun lagi. Garis kemiskinan adalah batas minimum pendapatan bulanan per kapita yang dianggap cukup untuk membiayai

kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya variabel faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi standar hidup minimum. Meski garis kemiskinan menurun, namun jumlah penduduk miskin cenderung stabil atau bahkan agak meningkat pada beberapa tahun tertentu. Contohnya, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 16,56 ribu orang, yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin juga menunjukkan pola yang mirip dengan jumlah penduduk miskin. Secara umum, persentase ini juga stabil atau sedikit naik-nurun selama periode waktu tersebut.

**Tabel 2. 2 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pematang, 2015 – 2023**

<b>Tahun</b> <i>Year</i>	<b>Garis Kemiskinan</b> <b>(rupiah/kapita/bulan)</b> <i>Poverty Line</i> <i>(rupiah/capita/month)</i>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (ribu)</b> <i>Number of Poor People</i> <i>(thousand)</i>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b> <i>Percentage of Poor People</i>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
2015	319.434	227,08	17,58
2016	331.587	225,00	17,37
2017	351.183	208,34	16,04
2018	372.115	200,67	15,41
2019	389.209	209,03	16,02
2020	401.857	215,08	16,56
2022	429.549	195,84	15,06
2023	467.204	195,57	15,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang

Analisis garis kemiskinan di Kabupaten Pematang dari tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren penting. Mulai dari tahun 2015, garis kemiskinan telah berkembang dari Rp319.434 per bulan menjadi Rp467.204 per bulan pada tahun 2023, dengan peningkatan secara moderat setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya pengeluaran bulanan masyarakat, jumlah penduduk justru mengalami penurunan dengan variasi yang signifikan pada beberapa tahun. Meskipun mengalami penurunan sebesar 14% selama delapan tahun terakhir, terdapat tren kenaikan penduduk miskin pada 2020 sebesar 3% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Secara simultan, persentase penduduk miskin juga

mengalami fluktuasi, turun dari 17,58% pada tahun 2015 menjadi 15,41% pada tahun 2018. Kemudian, mulai terjadi tren peningkatan rentang 2019 – 2020, sebelum akhirnya kembali turun mulai tahun 2022. Meski garis kemiskinan menurun secara nominal, namun stabilitas dan variabilitas dalam jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa kompleksitas isu kemiskinan masih signifikan dan memerlukan solusi multi-aspek untuk mengatasinya.

## **2.2 Gambaran Umum Kelembagaan**

Pada pembahasan gambaran umum kelembagaan, akan merujuk pada struktur dan fungsi suatu organisasi, termasuk bagaimana interaksi antar anggota organisasi, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana tanggung jawab dibagi. Memahami gambaran umum kelembagaan sangat penting karena memberikan kerangka kerja yang jelas bagi anggota organisasi untuk beroperasi secara efektif. Struktur ini membantu dalam mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih baik di antara anggota. Dengan adanya gambaran yang jelas mengenai kelembagaan, organisasi dapat lebih mudah mencapai tujuan strategisnya, mengoptimalkan alur kerja, dan meningkatkan kolaborasi dalam tim.

Dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, gambaran umum kelembagaan menjadi sangat relevan. Dinas ini memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, mulai dari Kepala Dinas hingga berbagai bidang dan subbagian di bawahnya yang memiliki tugas spesifik. Dengan pemahaman yang mendalam struktur ini, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat menjalankan fungsinya dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

### **2.2.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten**

#### **Pemalang**

Menurut Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU TR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 juga mengatur tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Tugas utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang adalah mencakup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi beberapa aspek penting.

### **2.2.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten**

#### **Pemalang**

Visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang sejalan dengan visi dan misi dari Kabupaten Pemalang sendiri. Visi tersebut yaitu “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis, dan Ngangeni (AMAN)”. Secara keseluruhan, visi ini mencerminkan keinginan untuk membangun Kabupaten Pemalang sebagai daerah yang tidak hanya



berkembang secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, nilai-nilai agama, dan kualitas hidup masyarakat. Adapun misi dalam mewujudkan visi tersebut, antara lain:

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan keterlibatan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang Agamis, Toleran, dan Gotong Royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentunya menjalankan misi dalam aspek pembangunan dengan mewujudkan pemerataan pembangunan baik di desa maupun di kota. Selain itu, dilakukan pembangunan infrastruktur yang maksimal dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap infrastruktur serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

### **2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas pokok yang tercantum dalam peraturan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa konstruksi, cipta karya, dan tata ruang.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa konstruksi, cipta karya, dan tata ruang.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga serta jasa konstruksi, cipta karya, dan tata ruang.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

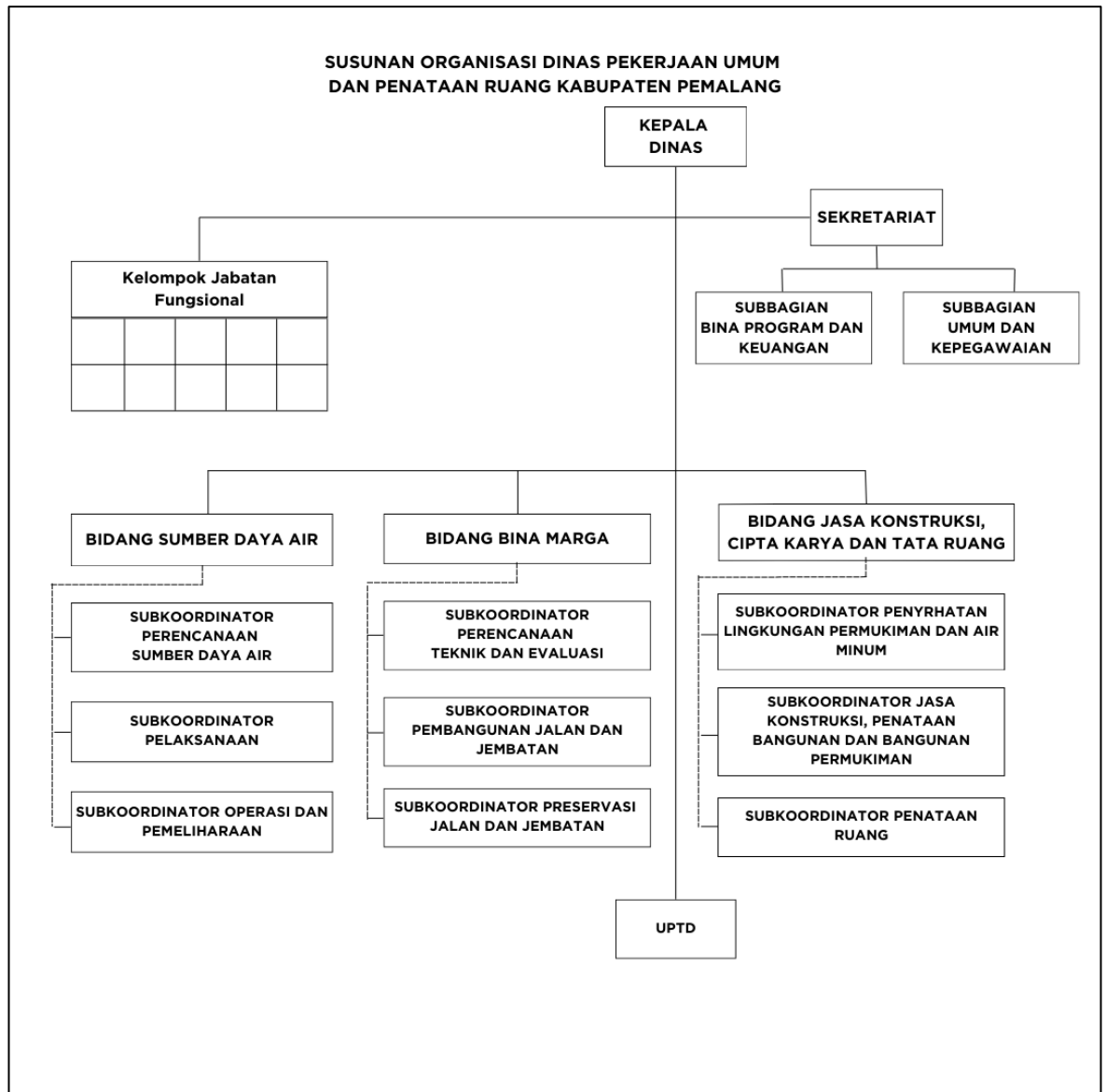
#### **2.2.4 Susunan Organisasi**

Struktur atau susunan organisasi mendeskripsikan tentang tupoksi atau pembagian kerja dalam suatu organisasi. Adapun susunan organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari
  1. Subbagian Bina Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
  1. Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air
  2. Subkoordinator Pelaksanaan; dan
  3. Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
  1. Subkoordinator Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
  2. Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

3. Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruan, terdiri dari:
1. Subkoordinator Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
  2. Subkoordinator Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan dan Bangunan Permukiman; dan
  3. Subkoordinator Penataan Ruang
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2021. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas keseluruhan

fungsi dan kegiatan di bidang pekerjaan umum. Di bawahnya terdapat beberapa bidang, masing-masing dengan tugas spesifik, yaitu Bidang Bina Marga, yang fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; Bidang Sumber Daya Air, yang menangani pengelolaan sumber daya air; Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Penataan Ruang yang berfokus pada pembangunan fasilitas publik dan mengatur penggunaan ruang wilayah. Selain itu, terdapat Sekretariat yang mengelola administrasi dan keuangan dinas, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Setiap bidang dan UPT memiliki subbagian yang membantu dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Siantar dapat beroperasi secara efektif dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaannya di Kabupaten Pematang Siantar.

#### **2.2.5 Sumber Daya Manusia**

Salah satu elemen vital dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi adalah sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, karena kualitas dan kemampuan tenaga kerja akan langsung memengaruhi produktivitas dan efektivitas operasional. Dalam konteks pengelolaan aset bergerak, sumber daya manusia menjadi penggerak dalam tahapan-tahapan pengelolaan aset yang baik. Sumber daya manusia merujuk pada potensi dan kemampuan individu yang terlibat dalam suatu organisasi, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang mereka miliki.

Dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, pengelolaan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Dinas ini bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur yang berkualitas, yang memerlukan tenaga kerja terampil dan profesional. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat meningkatkan efisiensi proyek-proyek pembangunan, memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas turut berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang optimal, dan keterampilan yang relevan.

Ketika sumber daya manusia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, mereka dapat berpartisipasi secara lebih produktif dalam perekonomian, menghasilkan *output* yang lebih tinggi, dan meningkatkan daya saing suatu daerah. Sebaliknya, peningkatan indeks pembangunan manusia juga memberikan dampak positif pada kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, individu akan lebih mampu mengembangkan potensi mereka yang akan meningkatkan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. Analisis mengenai indeks pembangunan manusia (IPM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang telah disediakan. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam konteks ini, fokus akan diberikan pada dimensi pendidikan yang tercermin dari komposisi pegawai.

**Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

No.	Tingkat pendidikan	Status Kepegawaian			Jenis Kelamin	
		CPNS	PNS	PPPK	Laki-laki	Perempuan
1.	SD	-	0	-	0	0
2.	SMP	-	2	-	2	0
3.	SMA	-	17	-	16	1
4.	D1	-	0	-	0	0
5.	D2	-	0	-	0	0
6.	D3	-	6	-	4	2
7.	S1	-	22	-	14	8
8.	S2	-	7	-	4	3
9.	S3	-	0	-	0	0
Jumlah			54		40	14

Sumber: ASN Kabupaten Pemalang dalam Angka 2023

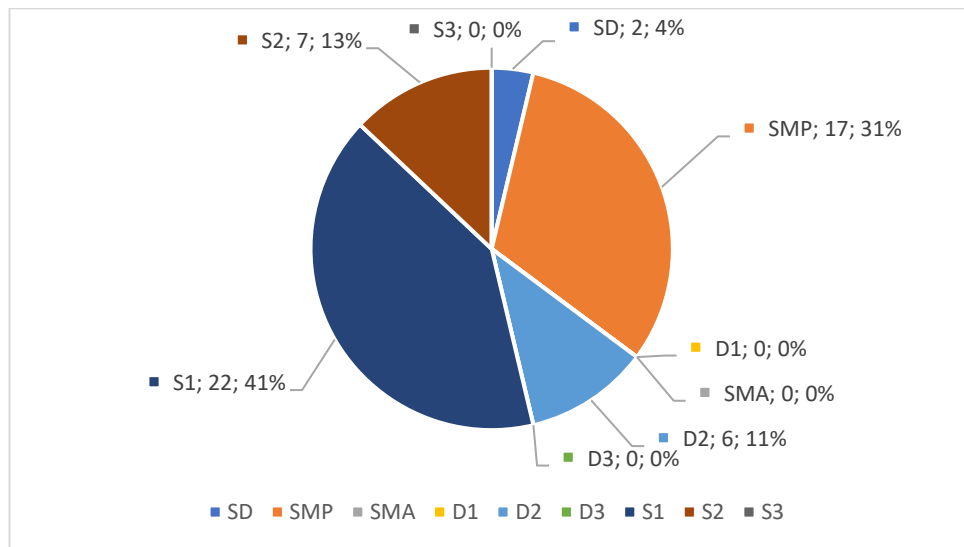
Berdasarkan tabel di atas, indeks pembangunan manusia dapat dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan. Mulai dari pendidikan rendah yaitu antara SD hingga SMP, hanya terdapat dua pegawai dengan latar belakang SMP, sementara tidak ada pegawai dengan latar belakang SD atau lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa ada pengurangan dalam jumlah pegawai dengan pendidikan rendah, yang mungkin berkontribusi positif terhadap kualitas layanan. Untuk pendidikan menengah yaitu antara SMA hingga D3, pegawai dengan pendidikan SMA mencapai 31%, sedangkan D3 sebanyak 11%. Meskipun ada proporsi pegawai dengan pendidikan menengah, jumlahnya masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pegawai berpendidikan tinggi. Terakhir untuk pendidikan tinggi rentang S1 hingga S2, sekitar 54% pegawai memiliki gelar sarjana S1 dan 13% memiliki gelar

magister S2. Hal ini menunjukkan bahwa dinas ini memiliki sumber daya manusia yang cukup terdidik, yang dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik.

Implikasi dimensi pendidikan pada pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah kabupaten tersebut. Dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi, potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perencanaan infrastruktur menjadi lebih besar. Walaupun data ini tidak secara langsung mencerminkan dimensi kesehatan dan standar hidup, adanya pegawai terdidik cenderung berhubungan dengan peningkatan kesadaran akan kesehatan serta kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan yang lebih baik. Secara keseluruhan, komposisi pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki sumber daya manusia yang cukup berkualitas dari segi pendidikan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM di wilayah tersebut.



**Grafik 2. 6 Persentase Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023**



Sumber: ASN Kabupaten Pemalang dalam Angka 2023 (diolah)

### 2.3 Aset Bergerak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah (BMD) adalah seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah, yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang perolehannya dilakukan secara sah. Perolehan lain yang sah ini mencakup barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan, pelaksanaan perjanjian dan perolehan dari kontrak, serta barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. BMD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena itu Pengelolaan BMD sangat penting karena pengelolaan aset ini memiliki dampak langsung terhadap kinerja

pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang baik, BMD dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mendukung transparansi, dan akuntabilitas, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah yang selanjutnya sering disebut sebagai aset daerah, dibagi menjadi dua kategori utama yaitu aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset tidak bergerak mencakup tanah, bangunan, dan infrastruktur lainnya, sedangkan aset bergerak adalah barang-barang yang dapat dipindahkan kemanapun dengan mudah. Aset bergerak terdiri dari berbagai jenis yang memiliki peran penting dalam operasional pemerintah daerah. Jenis aset bergerak ini meliputi kendaraan dinas seperti mobil dan sepeda motor; peralatan kantor seperti komputer, printer, meja, kursi; serta alat-alat berat yang digunakan dalam proyek-proyek pembangunan. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, misalnya aset bergerak yang dimiliki mencakup berbagai alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan truk angkut.

Peruntukan dari aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang sangat bervariasi. Kendaraan dinas biasanya digunakan untuk transportasi pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari dan untuk kegiatan survei lapangan terkait proyek infrastruktur. Sementara itu, alat berat seperti ekskavator dan bulldozer digunakan dalam kegiatan konstruksi jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan pengelolaan yang baik terhadap aset bergerak ini, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang

dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek pembangunan serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

### **Gambar 2. 3**

#### **Proses Perbaikan Ruas Jalan di Pemalang dengan Barang Milik Daerah**



Sumber: [pemalangkab.go.id](http://pemalangkab.go.id)

Dalam upaya meningkatkan infrastruktur jalan di Pemalang, pemerintah daerah telah melakukan perbaikan jalan skala besar. Alat berat modern milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipilih karenan memiliki kemampuan tinggi dalam proyek tersebut. Dengan cara ini, proses perbaikan jalan dapat diselesaikan dengan cepat dan tetap menjaga mutu hasil. Selain itu, penggunaan alat berat sesuai peruntukkan juga mengurangi risiko cedera kerja dan kerusakan lingkungan tambahan. Hasilnya, ratusan ruas jalan di Pemalang berhasil diperbarui hingga mencapai standar yang baik, sehingga meningkatkan aksesibilitas warga setempat maupun pendatang. Manfaat signifikan dari perbaikan infrastruktur seperti jalan

adalah meningkatnya mobilitas transportasi barang dan manusia. Hal ini berkontribusi besar pada aktivitas ekonomi lokal, membantu meningkatkan perdagangan, dan layanan jasa. Dengan demikian, investasi dalam perbaikan jalan menggunakan aset bergerak tidak hanya memberikan dampak positif jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Pemalang secara keseluruhan.

Pengelolaan barang milik daerah yang efektif juga akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi penggunaan aset-aset tersebut. Misalnya, jika alat berat tidak digunakan secara penuh untuk proyek pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mempertimbangkan untuk menyewakan alat tersebut kepada pihak ketiga. Dengan demikian, pengelolaan barang milik daerah tidak hanya berfungsi untuk mendukung operasional pemerintahan tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan barang milik daerah agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.